

ANALISIS TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN JAYAPURA



Dr. Janviter Manalu, M.Si.



**Analisis Transformasi Ekonomi Kampung
Terpadu Secara Berkelanjutan
Di Kabupaten Jayapura**

Analisis Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Jayapura

Dr. Janviter Manalu, M.Si.



Analisis Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Jayapura

Penulis:
Dr. Janviter Manalu, M.Si.

Editor:
Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si

Layouter :
Tim Kreatif PRCI

Cover:
Rusli

Cetakan Pertama : November 2021

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 18,2 x 25,7 cm
ISBN : 978-623-448-177-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Analisis Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Jayapura

Buku dengan judul Analisis Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Secara Berkelanjutan Di Kabupaten Jayapura merupakan hasil kajian transformasi ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Jayapura dengan menggunakan konsep kearifan lokal. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

November 2021, Penulis

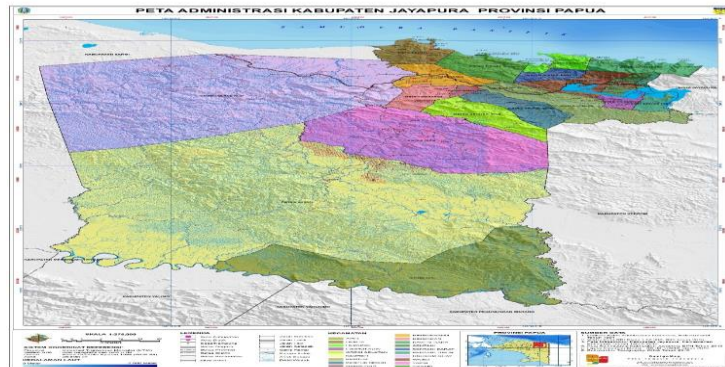
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENGANTAR PENTINGNYA TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) DI KABUPATEN JAYAPURA	1
BAB II KONSEP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGEMBANGAN KAMPUNG TERPADU	3
A. Pengertian Lingkungan Hidup	3
B. Konsep Pengembangan Kampung.....	4
C. Proses Pemecahan Masalah	5
BAB III GAMBARAN UMUM PENDAPATAN DAN ASET RUMAH TANGGA DAN MASYARAKAT, TERMASUK URUSAN EKONOMI, TINGKAT PENDAPATAN, DAN GIZI KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA	9
A. Pendapatan Dan Aset Rumah Tangga Dan Masyarakat.....	9
B. Aset rumah tangga.....	11
BAB IV KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, KONDISI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN; (TINGKAT PENDIDIKAN, DEMOGRAFI PENDUDUK)	21
A. Kapasitas sumber daya manusia.....	21
B. Aspek Sosial.....	23
C. Aspek Pendidikan	28
D. Aspek Demografi.....	30
BAB V KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN; (INFORMASI PERTANIAN, PRODUKSI DAN SUMBERDAYA ALAM, KETERSEDIAAN/AKSESIBILITAS AIR BERSIH, PERIKANAN DAN PETERNAKAN).....	36
A. Ketahanan Pangan Dan Produktivitas Pertanian	36
B. Ketersediaan/Aksesibilitas Air Bersih	39
BAB VI KEGIATAN PEMUDA DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BERDASARKAN ADAT DAN BUDAYA SETEMPAT (MENGIKUTI PENDEKATAN GESI);.....	44
BAB VII KELEMBAGAAN, FAKTOR EKSTERNAL DAN POLITIK.....	50
BAB VIII ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA.....	61
BAB IX KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA TRANSFORMASI EKONOMI.....	67
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

Pengantar Pentingnya Transpormasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Di Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten yang memiliki Luas wilayah yang mencapai 17516.6 km². Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Jayapura terletak pada koordinat 139°25'32.4" – 140°38'38.53" Bujur Timur dan 3°45'7.28 – 2°19'21.82" Lintang Selatan. Ibukota kabupaten ini di Sentani. Peta administrasi Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada Gambar 1. Pada Gambar 1 terlihat batas-batas wilayah Kabupaten Jayapura. Wilayah utara Kabupaten Jayapura berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Kabupaten Sarmi. Wilayah Selatan Kabupaten Jayapura berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara. Wilayah Timur Kabupaten Jayapura berbatasan dengan Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom, sedangkan untuk wilayah barat Kabupaten Jayapura berbatasan dengan Kabupaten Sarmi.



Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Jayapura
Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2021.

Kabupaten Jayapura terbagi menjadi 19 kecamatan, Kecamatan Kaureh dengan luas 4537.9 km² merupakan distrik terluas di Kabupaten Jayapura atau sekitar 24.88 persen dari luas keseluruhan Kabupaten Jayapura dan kecamatan Sentani Barat merupakan kecamatan yang luasnya terkecil dengan luas sekitar 129.2 km² atau sekitar 0.74 persen dari luas Kabupaten Jayapura. Luas wilayah setiap kecamatan pada Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1. Luas Kecamatan di Kabupaten Jayapura

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ² /sq.km)	Persentase terhadap luas kabupaten (%)
Kaureh	4357.9	24.88
Airu	3099	17.69
Yapsi	1291.3	7.37
Kemtuk	258.3	1.47
Kemtuk Gresi	182.4	1.04
Gresi Selatan	143.9	0.82
Nimboran	710.2	4.05
Namblong	193.7	1.11
Nimbokrang	774.8	4.42
Unurum Guay	3131.3	17.88
Demta	497.5	2.84
Yokar	519.5	2.97
Depapre	404.3	2.31
RaveniRara	467.4	2.67
Sentani Barat	129.2	0.74
Waibu	258.3	1.47
Sentani	225.9	1.29
Ebungfauw	387.4	2.21
Sentani Timur	484.3	2.76
Total	17.516.60	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Jayapura, 2021

BAB II

Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Kampung Terpadu

A. Pengertian Lingkungan Hidup

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan berdasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup sebagai :

Definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya (Siahaan, N.H.T, 2004). Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU

Adapun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Lingkungan Indonesia antara lain adalah sebagai berikut: (1) Berbagai peraturan tentang Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan, khususnya pada PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Arianto (2008: 21) lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Di atas lingkungan hidup inilah manusia berusaha mencapai dan meningkatkan kemakmuran.

B. Konsep Pengembangan Kampung

Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya kampung dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara *bottom up*. Dimana kampung terdiri dari kepala kampung dan perangkatnya serta badan permusyawaratan kampung (BPK) sebagai legislatif kampung. Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan kampung yang dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan mekanisme seperti ini, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kampung seharusnya bersifat *bottom up*. Akan tetapi selama ini, baik perencanaan maupun implementasi pembangunan kampung selalu bersifat *top down*, dimana kampung hanya menerima program-program pembangunan dari pemerintah. Berdasarkan mekanisme perundang-undangan yang ada, seharusnya kampung memiliki *grand design* pembangunan sendiri (inisiatif kampung), jika kampung memiliki *grand design* dalam pembangunan kampungnya, maka kampung dimungkinkan hanya akan mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. sedangkan inisiatif untuk melakukan dan melaksanakan pembangunan datang dari inisiatif kampung sendiri.

Lebih lanjut, dalam pengajuan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh kampung kepada pemerintah, terdapat klasifikasi program, misalnya untuk pembangunan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, kampung dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya untuk membangun sekolah, pasar kampung, listrik, air, dan sebagainya. Disisi lain, kampung dimungkinkan juga untuk dapat melakukan riset aset - aset potensi sumberdaya dan bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya terkait dengan kondisi tanah atau lahan yang produktif dan yang tidak produktif.

Hingga, semua pengajuan program pembangunan kampung muncul dari inisiatif berdasarkan pada kondisi eksisting dan tata ruang kampung, dengan demikian, pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten/kota) seharusnya hanya mendorong dan meningkatkan kapasitas asset-aset sumber daya di kampung agar mampu merencanakan pembangunan kampungnya, sehingga pemerintah pusat hanya melakukan pembiayaan berbagai program pembangunan yang diajukan oleh kampung, permasalahan tersebut selalu terjadi karena kampung sendiri tidak memiliki konsep dalam merancang pembangunan kampung dan pemerintah juga tidak memahami akan eksistensi pembangunan kampung berdasarkan keunikan dan kekhasan kampung dengan memaksakan berbagai programnya.

Griapon (2015) pola penerapan hukum adat dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Jayapura terdiri atas 4 tahapan yaitu:

- a. Tahap Perencanaan: Pada tahap ini sebelum tim perencanaan membuat dokumen perencanaan yang memuat survey sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi masyarakat, perkiraan harga tanah dan dampak lingkungan serta dampak sosial di buat pihak yang membutuhkan tanah terlebih dahulu melakukan sosialisasi rencana program pembangunan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat adat tanpa terkecuali.
- b. Tahap Persiapan: Tim perencanaan menyerahkan dokumen perencanaan kepada petinggi-petinggi adat. Setelah dokumen perencanaan diserahkan, tim persiapan bersama-sama dengan petinggi-petinggi adat dan masyarakat pemilik tanah melakukan konsultasi publik, pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah dan penetapan lokasi pembangunan.
- c. Tahap Pelaksanaan: Setelah pengumuman lokasi pembangunan, instansi yang membutuhkan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah yang dilampiri dokumen perencanaan pengadaan tanah diserahkan kepada Iram/Trang selaku petinggi adat dan kepala BPN (Kantor Pertanahan).
- d. Tahap Penyerahan Hasil: Setelah proses inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dilakukan, instansi yang memerlukan tanah bersama-sama Iram/Trang dan Petinggi-petinggi adat melakukan proses pelepasan secara hukum adat yang ditandai dengan surat pelepasan adat.

C. Proses Pemecahan Masalah

TEKAD ini adalah: data mengenai 1). Pendidikan, 2). Kesehatan, 3). Perumahan dan aset, 4). Jenis usaha yang dilakukan, 5). Pengolahan dan akses pasar, 6). Layanan keuangan, 7). Pola makan dan menu, 8). Keberlanjutan lingkungan dan ketahanan iklim, 9). pemberdayaan perempuan dalam pertanian spesifik, 10). perusahaan pedesaan, 11). dana desa dan pendapat desa, dan 12). Penyusunan RPJM kampung/desa di Kabupaten Dogiyai

Cara pengumpulan data dalam kegiatan ini adalah menggunakan kuesioner, dengan teknik wawancara langsung kepada setiap responden, responden yang menjadi obyek wawancara adalah: Kepala desa, wakil perempuan, wakil pemuda, penduduk asli, non asli, grup minoritas. Kelompok sasaran terdiri dari rumah tangga petani kecil, pengusaha mikro dan rumah tangga di desa Pesisir yang terlibat dalam penangkapan ikan dan produksi hasil laut Kelompok sasaran terdiri dari rumah tangga petani miskin, pengusaha kecil

/ usaha rumah tangga dan rumah tangga miskin di Pesisir. desa yang terlibat dalam penangkapan ikan dan produksi makanan laut.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Literatur;
2. Mengumpulkan data kuantitatif / kualitatif dari bidang sasaran sesuai dengan metodologi penelitian yang ditetapkan;
3. Data kualitatif atau kuantitatif:
4. Pengumpulan data di lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Data kuantitatif
 - Data kuantitatif diperoleh dengan modul instrumen survei terstruktur, dalam kegiatan survei dasar akan digunakan beberapa modul, antara lain: (i). Perumahan dan barang rumah tangga: (ii). Produksi dan sumber daya alam meliputi: Informasi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan darat dan perikanan tangkap), (iii). Proses Pasar dan akses; (iv). Jasa keuangan, (v). Kelestarian lingkungan dan ketahanan iklim, (vi). Bisnis pedesaan, (vii). Khusus untuk Pro Weai, (viii). Organisasi produsen, (ix). Pengumpulan dana desa dan ADD, dimana data primer diperoleh secara langsung dengan observasi atau wawancara langsung dengan pihak terkait sebagai objek penelitian;
 - Data primer disertai dengan risalah atau risalah yang ditandatangani oleh lembaga yang dikunjungi dan disertai dengan foto atau dokumentasi film;

Tanggung jawab perwakilan universitas meliputi:

- Rancang / sesuaikan / filter kuesioner untuk memastikan kuesioner yang disesuaikan dengan situasi lokal dan cukup untuk mengumpulkan data dasar tentang indikator yang dipilih. Versi terbaru questionnaire dengan MOV juga jelas.
- Format / tata letak questionnaire, pastikan semua template jelas dan kode semua pertanyaan.
- Mempersiapkan adalah dokumentasi pendukung, termasuk panduan pengkodean, wawancara dan pengawas untuk manual dan manual entri data .. juga mengirimkan salinan kertas dan elektronik dari semua dokumen ke MOV.

b. Data kualitatif

Mungkin perlu untuk melengkapi data kuantitatif dengan data yang dikumpulkan dengan metode kualitatif dan partisipatif seperti wawancara terbuka dan semi-terstruktur dengan informan kunci, observasi langsung atau partisipan, diskusi kelompok, survei komunitas, klasifikasi kekayaan, jalur transek dan pemetaan kelembagaan. Fleksibilitas metode ini memungkinkan triangulasi data, pemeriksaan silang, dan analisis di lokasi. Data kualitatif memungkinkan penyelidikan mendalam atas masalah, kasus atau peristiwa yang dipilih dan memberikan informasi penting tentang prospek penerima manfaat, dinamika reformasi tertentu, atau alasan di balik hasil yang diamati dalam analisis kuantitatif.

Informasi dapat diperoleh berdasarkan:

- Diskusi
Pertemuan kelompok untuk membahas sejumlah masalah dan mencatat serta membuat kesimpulan.
- Wawancara (menggunakan kuesioner)
Dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang terkait langsung dengan program, responden berhak memberikan data dan informasi yang diperlukan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yaitu: (1). Rumah tangga desa; (2) Petani, nelayan dan kelompok tani olahan, koperasi, BUM desa, kelompok perempuan, karang taruna, dsb di wilayah binaan / contoh; (3) lurah desa / kelurahan sasaran; dan (4) Lembaga keuangan desa (bank daerah, bank umum, bank swasta, dll.)
- Pengumpulan data sekunder dari pemerintah daerah
Pengumpulan data sekunder harus up to date atau data terbaru. Data sekunder yang diperlukan adalah;
 - a. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) berlanjut tahun ini dan 2 tahun sebelumnya;
 - b. Rencana strategis (renstra) berlanjut tahun ini dan 2 tahun sebelumnya;
 - c. Renja (rencana kerja) SKPD dilanjutkan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya.

Kegiatan lapangan terdiri dari:

- a. Persiapan kegiatan lapangan: (i) Rekrutmen coordinator dan enumerator; (ii) Mempersiapkan atau mencetak kuesioner sesuai kebutuhan, (iii) mempersiapkan administrasi lain seperti (surat misi, perlengkapan lapangan, dll).
- b. Pelatihan coordinator dan simpatisan; (SAYA). Jelaskan pedoman implementasi; (ii) Praktek pengumpulan data. Memperkenalkan dan mempraktikkan validasi data, pembersihan data, entri data. (iv). Administrasi diperlukan.
- c. Penyajian lokasi desa dan penggandaan informasi pada semua data yang diperlukan sebelum pengumpulan data. pada khususnya (rumah tangga miskin, kepala desa, lembaga ekonomi desa, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, laki-laki dan perempuan muda), produktivitas pertanian, kegiatan pertanian, dll.
- d. Bekerja sama dengan desa dan masyarakat, menetapkan kategorisasi tujuan referensi, khususnya untuk penentuan sampel utama.
- e. Kumpulkan atau kumpulkan data (wawancara mendalam semi-terstruktur, diskusi kelompok, dll.)
- f. Kontrol kualitas pemulihan data.

BAB III

Gambaran Umum Pendapatan Dan Aset Rumah Tangga Dan Masyarakat, Termasuk Urusan Ekonomi, Tingkat Pendapatan, Dan Gizi Keluarga Kabupaten Jayapura

A. Pendapatan Dan Aset Rumah Tangga Dan Masyarakat

Peningkatan pendapatan rumah tangga adalah tolak ukur dari kemajuan suatu wilayah, meningkatnya pendapatan rumah tangga terletak dari aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap harinya dan juga ketersediaan pasar sebagai tempat berkumpulnya calon pembeli dan penjual. Aktivitas ekonomi masyarakat tersebut dapat berupa pengembangan komoditi lokal yaitu berupa komoditi pertanian, perternakan, perikanan tangkap dan perikanan darat, tanaman pangan yang unggul dan cocok dibudidayakan oleh masyarakat lokal.

**Tabel 2. Pendapatan Rumah Tangga Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
Tahun 2021 (Rp/Tahun)**

Jenis Tanaman	Kampung Inti	Kampung Pendamping
Tanaman Holtikultura	18.989.000	7.257.167
Tanaman Pangan	43.466.667	32.900.000
Tanaman Perkebunan	23.215.000	9.893.333

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Provinsi Papua memiliki potensi luas lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya sektor tanaman Holtikultura, Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan. Disamping geografis dan letak kabupaten jayapura yang strategis dan didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang mendukung. Jenis tanaman pangan memiliki pendapatan pertahun terbesar di kampung inti dan kampung pendamping dimana komoditas unggulan seperti: padi, ubi jalar, jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kacang hijau. Makanya perlunya Kerjasama dari pemerintah dan dinas terkait kepada masyarakat kampung sehingga hasil panen yang telah dihasilkan dapat dengan lancar di perdagangan kepada pembeli.

Tabel 3. Pendapatan Rumah Tangga Yang Bersumber Dari Hasil Peternakan Tahun 2021 (Rp/Tahun)

Jenis Ternak	Kampung Inti	Kampung Pemanding
Unggas	5.411.538	11.407.500
Ruminansia (Beranak)	47.870.645	48.034.394

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Sektor peternakan di Kabaputen Jayapura dapat dilihat jenis ternak unggas merupakan pendapatan terbesar di sektor peternakan pertahun untuk kampung inti dan pendamping. Ternak kecil yang terdapat di Kabupaten Jayapura adalah ayam ras pedaging, ayam buras, dan itik. Komoditas unggulan sektor ternak unggas adalah ayam ras pedaging dengan jumlah populasi ternak sebanyak 1.859.500 ekor (BPS 2019). Disamping itu jenis ternak Ruminansia (Beranak) memiliki pendapat pertahunnya jauh dibandingkan jenis ternak unggas padahal komoditas ternak unggulan sektor Ruminansia (Beranak) adalah sapi dan babi dengan jumlah populasi ternak masing-masing sebesar 15.125 ekor dan 16046 ekor (BPS, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa kendala yang masyarakat kampung alami seperti: kekurangan modal guna pemeliharaan, adanya penyakit yang terjangkau sedangkan peternak tidak mengetahui cara mengatasinya, kurangnya pengetahuan para peternak dalam budidaya ternak. Sehingga di butuhkan suatu kebijakan/upaya dari Pemerintah Kabupaten dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Seperti: memberikan bantuan modal pinjaman melalui bank kepada peternak, pemberantas penyakit ternak oleh dokter ternak, menyediakan bibit ternak unggulan, mendirikan balai penelitian ternak, memberikan penyuluhan kepada para peternak

Tabel 4. Pendapatan Rumah Tangga Yang Bersumber Dari Hasil Perikanan Laut/Tangkap dan Perikanan Darat Tahun 2021 (Rp/Tahun)

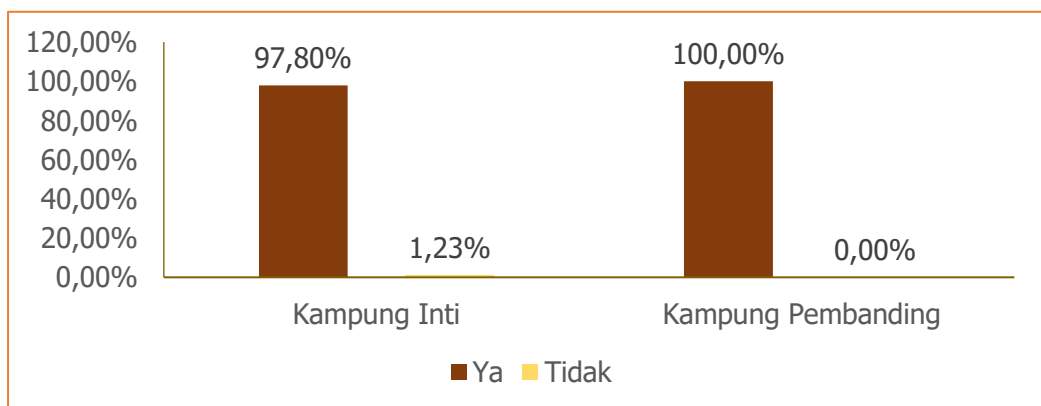
Klasifikasi	Kampung Inti	Kampung Pendamping
Perikanan Laut	332.958.690	395.293.065
Plagis Besar	133.110.714	136.282.500
Plagis Kecil	114.231.309	130.860.565
Demersal	85.616.667	128.150.000
Perikanan Darat	61.155.556	40.711.111

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Kabupaten Jayapura merupakan wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang cukup melimpah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terencana dan terstruktur oleh Departemen kelautan dan perikanan Provinsi melalui Departemen Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura dalam pengembangan potensi kelautan. Menurut pendapatan sektor perikanan laut merupakan sektor dengan pendapatan terbesar dengan komoditas unggulannya seperti: Plagis besar, Plagis kecil dan Demersal. Namun jenis perikanan darat juga mempunyai pendapatan yang jauh dibandingkan perikanan laut. Di karenakan kendala yang peternak ikan rasakan seperti kurangnya modal dalam membeli makanan ikan yang berkualitas, kurang pengetahuan peteni ikan dalam mengelolah dan membudidayakan ikan dengan benar, kurang mampu nya petani ikan dalam membeli bibit unggulan. sehingga dibutuhkan kebijakan dan solusi dari Pemerintah Kabupaten dan Dinas Peternakan dan Perikanan seperti: memberi bantuan modal dan bibit unggulan kepada petani ikan, memberi suatu pelatihan kepada petani ikan bagaimana membudidayakan perikanan yang berkualitas dan menghasilkan hasil yang melimpah.

B. Aset rumah tangga

Aset rumah tangga menggambarkan bahwa status sosial masyarakat tersebut, keberadaan aset rumah tangga diperoleh dari hasil kerja keras masyarakat tersebut, dapat juga berupa pemberian dari orang tua/keluarga/kerabat/teman serta berupa hadiah dari organisasi atau perusahaan. Keberadaan aset tersebut akan menambah kepercayaan diri dan derajat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.



Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Aset di Kabupaten Jayapura (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Persentase rumah tangga yang memiliki aset di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa terdapat 97.80% dan 100.00% kampung inti dan pembanding. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga di kampung inti yang tidak memiliki aset. Kondisi ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan cara mempercepat pembangunan ekonomi, infrastruktur jalan, jembatan dan pasar di berbagai kampung di seluruh wilayahnya.

Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat dan juga para pelaku usaha dapat menjual hasil produksi tanaman pangan seperti komoditi pisang, cabe, kopi, pinang, cengkeh, ikan nila, mujair, ternak babi, sapi, kambing dan berbagai komoditi unggulan lainnya. Lancarnya aktivitas masyarakat tersebut diharapkan dapat menciptakan tumbuhnya ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Informasi berikut akan menjelaskan tentang jenis aset rumah tangga yang dimiliki.

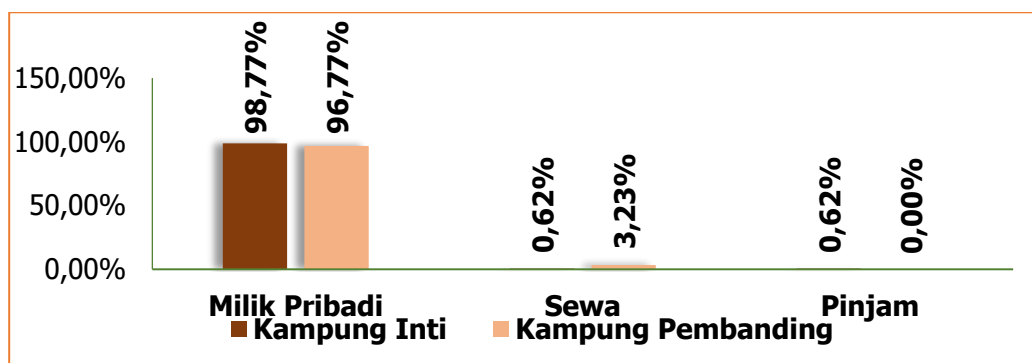
Tabel 6. Jenis Aset Rumah Tangga Yang Dimiliki Oleh Responden di Kabupaten Jayapura Tahun 2021

Aset Yang Dimiliki Rumah Tangga	Kampung Inti		Kampung Pembanding	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Meja	51.85%	48.15%	51.35%	48.65%
Kursi Tidak Berlapis	37.66%	62.34%	38.26%	61.74%
Kursi Berlapis Kain, Sofa	10.49%	89.51%	10.46%	89.54%
Meja Kopi	25.67%	74.33%	24.27%	75.73%
Lemari Pakaian, Laci, Meja, Meja Samping, Rak Buku	59.76%	40.24%	59.76%	40.24%
Tempat Tidur	50.60%	49.40%	52.26%	47.74%
Kipas Angin	33.14%	66.86%	32.94%	67.06%
Lentera (Parafin)	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
Jam	15.00%	85.00%	26.00%	74.00%
Mesin Jahit	3.23%	96.77%	3.23%	96.77%
Besi Untuk Pakian	15.65%	84.35%	15.65%	84.35%
Kulkas/Freezer	24.12%	75.88%	24.12%	75.88%
Kompore Arang	18.79%	81.21%	18.79%	81.21%
Kompore Minyak Tanah/Parafin	30.78%	69.22%	30.78%	69.22%
Kompore Listrik/Gas	5.65%	94.35%	5.65%	94.35%
Radio	28.76%	71.24%	28.76%	71.24%
Kaset/CD/Pemutar Audio	65.78%	34.22%	65.78%	34.22%
Tv/Vcr/Pemutar Dvd	65.78%	34.22%	66.78%	33.22%

Aset Yang Dimiliki Rumah Tangga	Kampung Inti		Kampung Pembanding	
	Ada	Tidak	Ada	Tidak
Antena Satelit	25.66%	74.34%	25.66%	74.34%
Smart Phone	30.75%	69.25%	30.75%	69.25%
Ponsel	55.95%	44.05%	54.72%	45.28%
Peralatan Dan Aksesoris Komputer	2.67%	97.33%	2.67%	97.33%
Perhiasan Dan Arloji	0.00%	100.00%	1.25%	98.75%
Sepeda	9.54%	90.46%	9.54%	90.46%
Sepeda Motor/Skuter	14.10%	85.90%	12.17%	87.83%
Kendaraan Bermotor	17.89%	82.11%	17.89%	82.11%
Perahu	15.98%	84.02%	16.29%	83.71%
Parang	33.45%	66.55%	33.45%	66.55%
Skop	21.89%	78.11%	21.89%	78.11%
Linggis	25.64%	74.36%	25.64%	74.36%
Alat Tukang	32.56%	67.44%	32.56%	67.44%

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

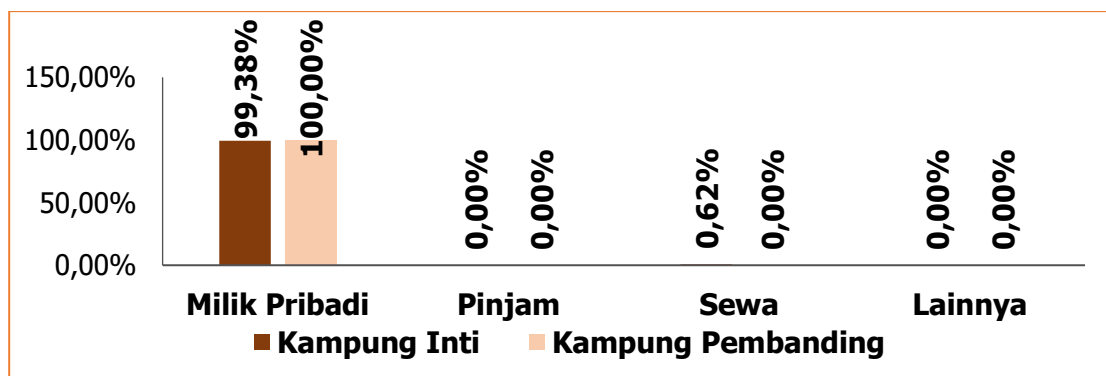
Aset rumah tangga di miliki oleh responden di kampung inti dan pembanding sudah mulai seimbang hal ini menggambarkan bahwa tingkat kehidupan di kampung inti dan pembanding sudah mulai maju dan sejajar dari kabupaten lainnya untuk aset meja dan kursi semua masyarakat kampung inti dan pembanding yang memilikinya. selain itu kualitas meja yang dimiliki oleh responden tersebut kondisinya sangat sederhana dan juga kualitasnya sebagian besar sudah mulai rusak. Data tersebut menjelaskan bahwa kondisi masyarakat setempat di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung kehidupannya masih hidup di bawah garis kemiskinan, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pemberian berbagai aset (meja, kulkas, kompor, alat pertanian, perternakan, perkebunan) terkait bagi masyarakat yang memiliki potensi usaha industri rumah tangga berupa makanan dan minuman, usaha pembuatan roti, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan tangkap dan darat serta tanaman pangan. Pemberian berbagai peralatan tersebut diharapkan dapat menumbuh kembangkan aktivitas produksi masyarakat



Tabel 7. Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Jayapura Tahun 2021

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Status kepemilikan rumah secara umum kondisi di Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa hampir seluruh responden di kampung inti dan pemandang memiliki rumah milik sendiri. Hal ini perlu mendapat pujian, dimana masyarakat setempat sudah memahami dengan betul manfaat kepemilikan rumah sebagai tempat bernaung dan juga melakukan aktivitas sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Upaya untuk menumbuhkan kembangkan aktivitas ekonomi masyarakat, maka perlu didukung dengan kebijakan pembangunan rumah layak huni dan untuk masyarakat yang masih sewa dan pinjam sebaiknya pemerintah memberi bantuan kepada kampung yang masih tidak memiliki aset kepemilikan pribadi.



Tabel 8. Status Kepemilikan Lahan Oleh Responden di Kampung Inti Dan Pemandang Kabupaten Jayapura Tahun 2021 (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Tingkat kepemilikan lahan baik untuk pembangunan rumah maupun lahan Pertanian, Perkebunan, peternakan dan budidaya

tanaman pangan oleh responden umumnya milik pribadi yaitu mencapai 99.38% dan 100% untuk kampung inti dan kampung pembanding. Hal tersebut mencerminkan bahwa responden adalah masyarakat asli setempat (OAP), status kepemilikan rumah oleh masyarakat tersebut sebagian besar lahan tersebut merupakan warisan dari leluhur maupun hasil pembelian oleh responden tersebut.

Tabel 9. Tingkat Konsumsi Gizi Rumah Tangga Di Kabupaten Jayapura Tahun 2021 (%)

No.	Konsumsi Keluarga	Kampung Inti		Kampung Pembanding	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Setiap makanan yang terbuat dari serl dan akar putih atau umbi atau pisang raja, seperti: Kentang putih, ubi putih, singkong /singkong/yucca, cocoyam, talas atau makanan lainnya berdasarkan akar atau umbi pisang atau umbi putih.	70,00%	30,00%	62,63%	37,37%
2	Semua kacang atau kacang polong seperti: Kacang atau kacang polong (biji segar atau kering), lentil atau produk kacang / kacang, termasuk hummus, tahu dan tempe	60,00%	40,00%	64,00%	36,00%
3	Semua kacang atau biji, seperti: Kacang, kacang / kacang tanah atau biji tertentu atau "mentega" dari kacang / biji atau pasta	64,00%	36,00%	62,61%	37,39%
4	Setiap susu atau produk susu, seperti: Susu, keju, yogurt, atau produk susu lainnya, tidak termasuk mentega, es krim, krim atau krim asam	62,80%	31,20%	57,78%	42,22%
5	Semua produk daging, unggas dan ikan, seperti:Daging hati, ginjal, jantung atau organ lain atau makanan berbasis darah, termasuk permainan liar. Daging sapi, babi, domba, kambing, kelinci, binatang	92,84%	8,34%	92,44%	7,56%

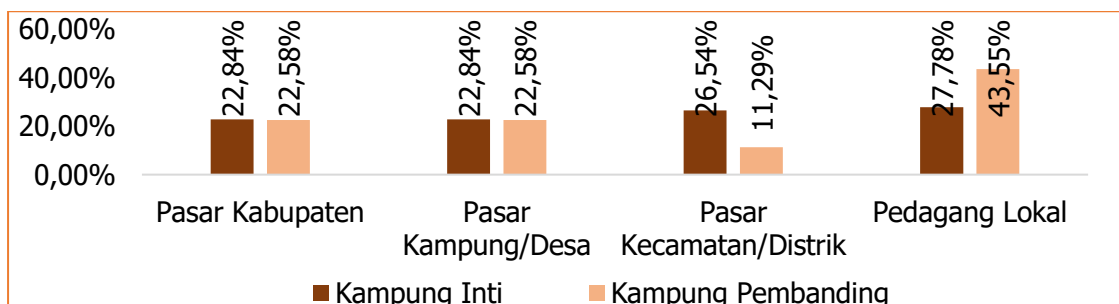
No.	Konsumsi Keluarga	Kampung Inti		Kampung Pemanding	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
	buruan, ayam, bebek, burung-burung lain. Ikan segar atau kering, krustasea atau makanan laut				
6	Semua telur: Telur unggas atau burung lain	83,30%	17,70%	85,56%	14,44%
7	Semua sayuran berdaun hijau gelap, seperti: Contoh sayuran berdaun hijau sedang sampai gelap, termasuk daun liar / hijauan yang tersedia di wilayah tersebut.	86,53%	15,93%	87,81%	12,19%
8	Semua buah-buahan, sayuran dan akar kaya akan vitamin A: Labu, wortel, labu atau ubi jalar yang berwarna kuning atau oranye, Mangga matang, pepaya matang, dan lain-lain	87,86%	13,74%	88,56%	11,44%

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat konsumsi gizi masyarakat tertinggi adalah terdapat dari daging babi, kambing, sapi dan ayam sebagai komoditi unggulan di Kabupaten Jayapura. Budaya masyarakat juga sangat mendukung terhadap tingginya tingkat konsumsi daging khususnya daging babi, Populasi ternak babi sebagai ternak terbesar dibandingkan ternak sapi, kerbau dan kambing. hal ini disebabkan oleh banyaknya peternakan skala rumah tangga serta tingginya tingkat kebutuhan konsumsi daging babi bagi masyarakat asli di kabupaten Jayapura untuk berbagai kegiatan adat dan istiadat maupun kegiatan keagamaan

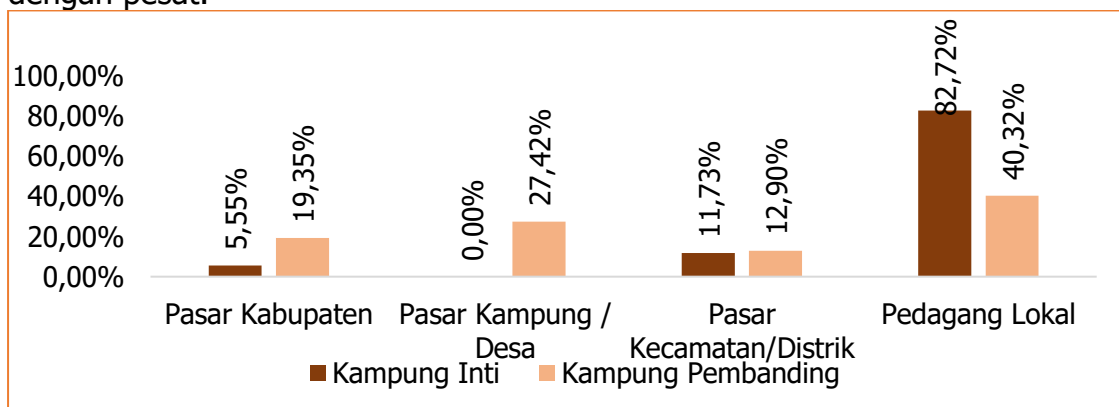
Strategi kebijakan yang dapat didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura adalah membantu memberikan bibit unggul ternak babi serta pakan ternak babi, hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan masyarakat petani budidaya ternak babi untuk mendapatkan pakan tersebut. Umumnya para peternak menggunakan nasi sisa-sisa masyarakat setempat yang disimpan pada tempat yang

telah disediakan oleh para peternak dan juga menggunakan sayur-sayuran sisa dari produksi pertanian masyarakat setempat.



Grafik 1. Tempat Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Kampung Inti dan Pemanding di Kabupaten Jayapura (%)
Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

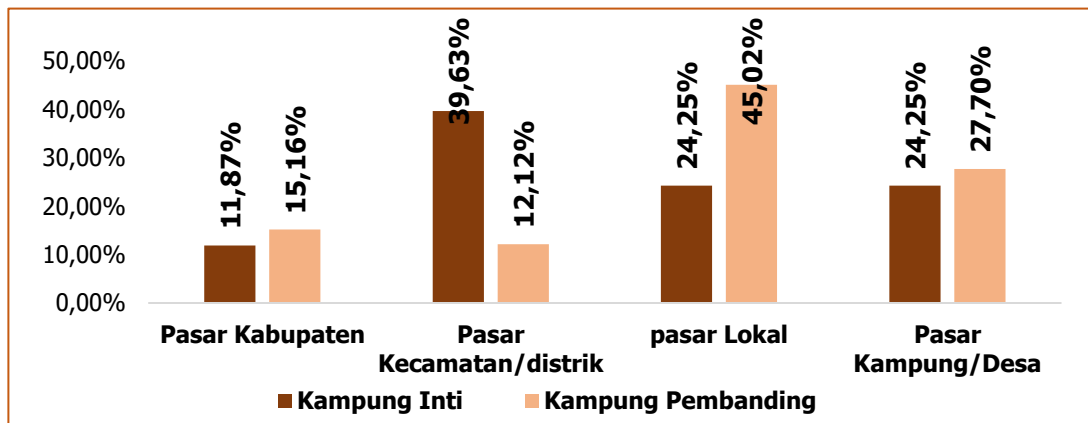
Pasar sebagai tempat pemasaran hasil produksi pertanian, di Kabupaten Jayapura untuk masyarakat kampung bisa menjual hasil produksi ke pedagang lokal hal ini menggambarkan tingkat perekonomian dan tingkat calon konsumen lokal akan meningkat dikarenakan produk yang dijual kepada konsumen dengan cepat di jual belikan/dagangkan dengan lancar dan akan meningkatkan kemajuan khusus nya perekonomian di kampung akan berkembang dan tumbuh dengan pesat.



Grafik 2. Tempat Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kampung Inti dan Pemanding di Kabupaten Jayapura (%)
Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

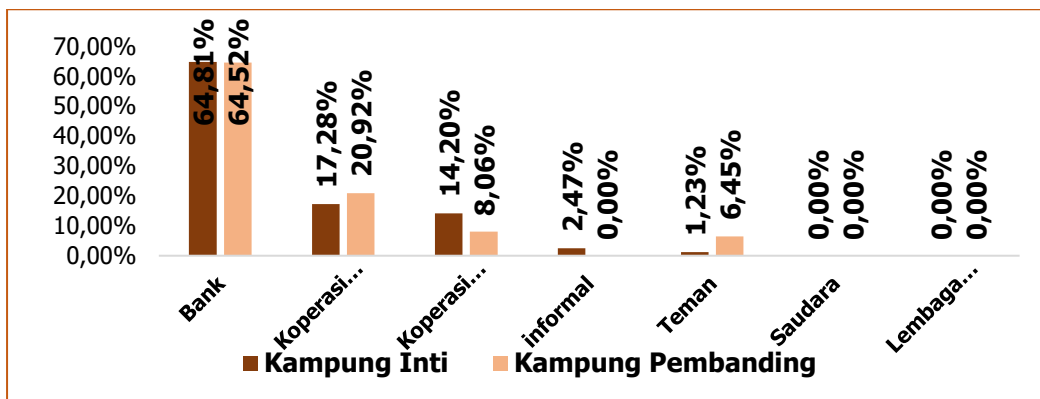
Tempat pemasaran hasil produksi peternakan di Kabupaten Jayapura baik untuk kampung inti dan kampung pemanding juga kondisinya tidak berbeda jauh yaitu terutama di pasar lokal yaitu mencapai 82,77% kampung inti dan 40,32% kampung pemanding. Hal ini menyebabkan masyarakat dapat dengan cepat memasarkan

produk hasil produksinya kepada calon pembeli dan dengan mudah nantinya perekonomian pedagang setempat akan tumbuh dan berkembang disamping itu kualitas dan mutu hasil produksi yang di pasarkan akan baik karena tidak memerlukan waktu dan lamanya pengantarannya.



Grafik 3. Tempat Pemasaran Hasil Produksi Perikanan laut/Tangkap Kampung Inti dan Pemandang di Kabupaten Jayapura (%)
Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021

Tempat pemasaran hasil produksi perikanan laut dan perikanan darat di Kabupaten Jayapura baik untuk kampung inti dan kampung pemandang masyarakat memasarkan hasil produksi merata untuk kampung inti masyarakat memasarkan hasil produksinya di pasarkan kecamatan/distrik sebesar 39.63% dan untuk kampung pemandang memasarkan hasil produksinya di pasar lokal sebesar 45.02% hal ini menggambarkan adanya kemajuan tingkat perekonomian di masyarakat kampung dimana produk masyarakat sudah dapat bersaing dengan produk daerah lainnya.

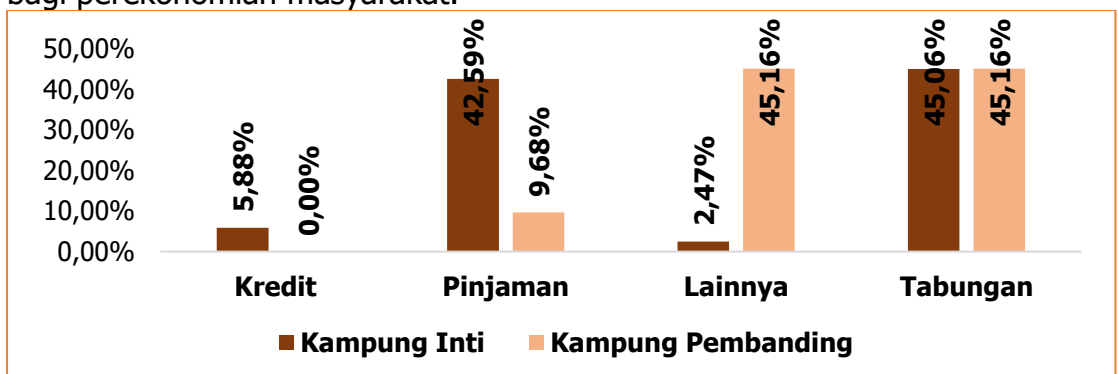


Grafik 4. Fasilitas Layanan Keuangan Yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Jayaputa Tahun 2021 (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Fasilitas layanan keuangan sangat membantu masyarakat untuk dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari termasuk aktivitas usahanya. Keberadaan bank baik milik pemerintah maupun milik swasta dapat memperlancar transaksi keuangan dan mempercepat transaksi jual-beli. Jumlah keberadaan bank di kampung inti hanya mencapai 64,81% sedangkan di kampung pemandang 64,52%.

Hal tersebut menjelaskan bahwa keberadaan bank sangat dibutuhkan oleh pihak masyarakat kampung dimana bank menjadi sarana masyarakat mempercepat transaksi dan percepatan perekonomian masyarakat dan diharapkan pemerintah dan pihak bank baik bank pemerintah maupun milik swasta melakukan Kerjasama agar nantinya masyarakat kampung semua dapat merasakan manfaat bank bagi perekonomian masyarakat.



Grafik 5. Bentuk Layanan Keuangan Yang Digunakan Rumah Tangga di Kabupaten Jayapura (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

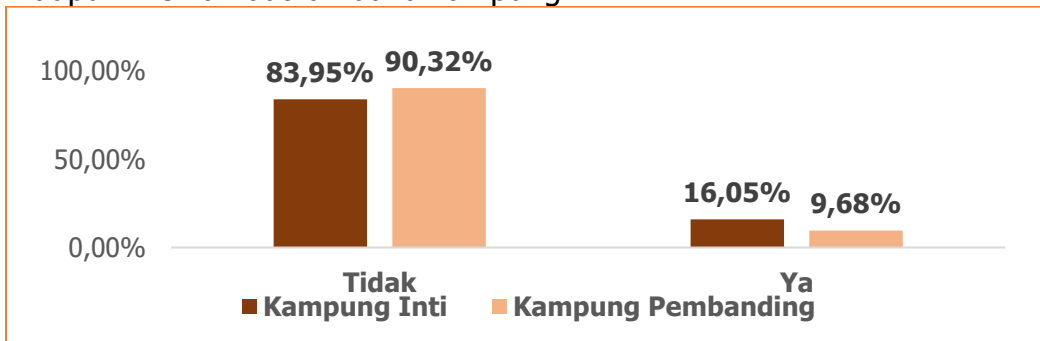
Bentuk layanan keuangan yang digunakan oleh responden di kampung inti adalah didominasi oleh bentuk tabungan mencapai 45,06% diikuti bentuk pinjaman mencapai 42,59%. Data ini menjelaskan variasi bentuk pemanfaatan layanan keuangan bank masih sangat minim, hal tersebut disebabkan oleh tidak berkembangnya aktivitas industri pengolahan di Kabupaten Jayapura dan juga aktivitas ekonomi perdagangan juga kurang berkembang dengan baik. Kondisi ini berdampak terhadap belum berkembangnya tingkat pemanfaatan terhadap pemanfaatan layanan bank lokal.

BAB IV

Kapabilitas Sumber Daya Manusia, Kondisi Sosial dan Pemberdayaan; (Tingkat Pendidikan, Demografi Penduduk)

A. Kapabilitas sumber daya manusia

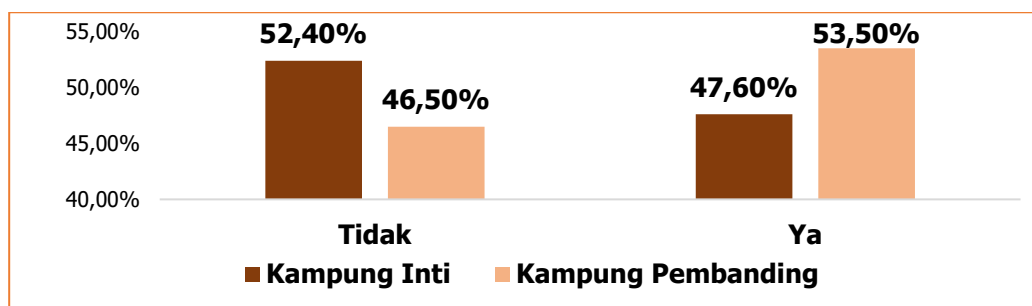
Kapabilitas masyarakat kampung dapat meningkat apabila masyarakat tersebut secara terus menerus mendapatkan sosialisasi terhadap berbagai dokumen perencanaan resmi daerah, dokumen undang-undang kampung merupakan salah satu dokumen resmi yang menjadi acuan bagi kampung dalam menjalankan roda pemerintahan maupun memanfaatkan dana kampung



Grafik 6. Persentase Masyarakat Kampung Yang pernah mendapatkan Sosialisasi Tentang Undang-undang Desa/Kampung/Negeri di Kabupaten Jayapura (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

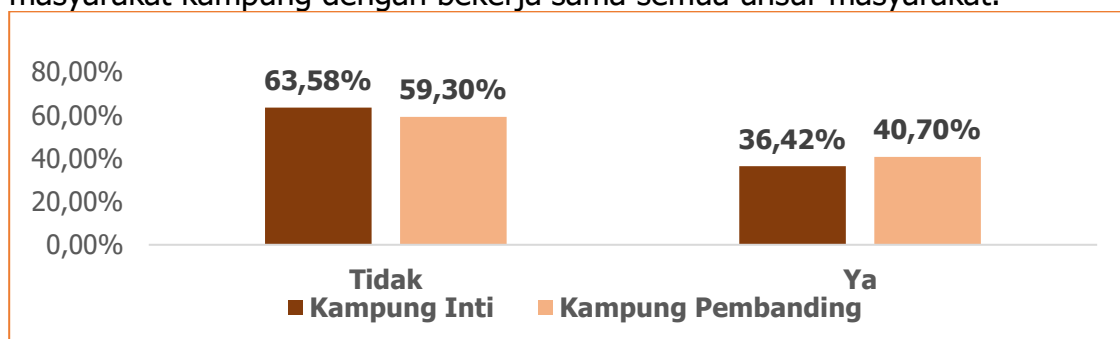
Data menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah masyarakat yang belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang undang-undang kampung yaitu mencapai 83.95% untuk kampung inti dan 90.32% untuk kampung pemandang. Kondisi ini harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dengan cara melakukan sosialisasi secara berjenjang.



Grafik 7. Persentase Masyarakat Yang Mengetahui Tentang Dana Desa/Kampung/Negeri di Kabupaten Jayapura (%)

Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Grafik persentase masyarakat yang tidak mengetahui tentang dana kampung mencapai 52.40% untuk kampung inti dan 46.50% untuk kampung pemandang, hal ini memerlukan suatu perhatian kepada pihak pemerintah Kabupaten Jayapura yaitu melakukan sosialisasi tentang dana kampung bagi masyarakat yang belum pernah mendengar. Strategi lain dapat juga mengajak masyarakat yang lain agar mau bekerjasama mengontrol dan mengawasi dana desa yang nanti digunakan untuk pembangunan di kampung dan memajukan tingkat keadaan sosial masyarakat kampung dengan bekerja sama semua unsur masyarakat.



Grafik 8. Persentase Masyarakat Kampung Yang Pernah Mendapatkan Sosialisasi Tentang Penggunaan Dana Desa/Kampung/Negeri di Kabupaten Jayapura (%)

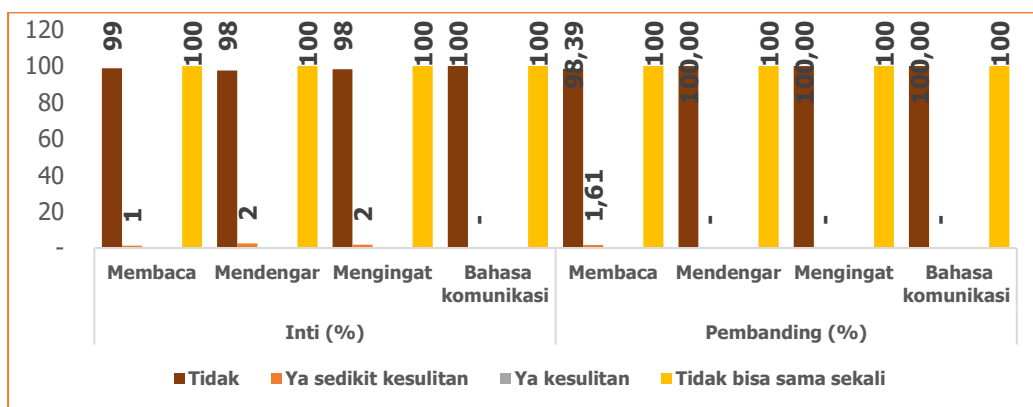
Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Sosialisasi tentang penggunaan dana kampung adalah tahapan awal dari seluruh proses pelaksanaan program dana kampung, tahapan sosialisasi dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan bekerjasama dengan aparat distrik dan kampung. Sosialisasi pertama dilaksanakan di tingkat kabupaten dilanjutkan ke tingkat distrik dan terakhir di tingkat kampung. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk

menyampaikan tentang program alokasi dana kampung, mekanisme pengajuan proposal, pembentukan tim pelaksana hingga tahap pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kelompok masyarakat maupun kelompok tani, kelompok masyarakat lainnya yang mendapatkan anggaran dana kampung.

B. Aspek Sosial

Kemajuan suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh aspek sosial, aspek sosial yang dibahas dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca, mendengar, mengingat, bahasa komunikasi, membaca, mendengar, mengingat antara kampung inti dan kampung pembanding. Informasi berikut akan menjelaskan lebih lengkap beberapa aspek tersebut.



Grafik 9. Presentase Responden Yang Mengalami Kesulitan Dalam Membaca, Berjalan, Merawat Diri Sendiri, Mendengar, Mengingat, Dan Bahasa Komunikasi Di Kampung Inti Dan Pembanding di Kabupaten Jayapura
Sumber: Hasil Survei, Data Diolah 2021.

Kondisi sosial responden menunjukkan bahwa masih adanya responden yang tidak bisa membaca, mendengar, mengingat hal ini membutuhkan perhatian bagi dari pihak pemerintah Kabupaten Jayapura dan dinas yang terkait dengan cara melakukan suatu pengobatan, pelatihan, pendampingan kepada masyarakat dengan diadakan kegiatan yang berdampak langsung bagi Kesehatan seperti pengobatan gratis dan pembelajaran kepada masyarakat yang kurang bisa membaca dan pelatihan bagi responden kampung.